

>> PEMERINTAH KOTA CIMAHI

LAKIP 2024

DINAS PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI
2024



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tata Pemerintah pada Perangkat Daerah yang baik merupakan refleksi dari Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Sebagaimana halnya Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan urusan Bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang selalu berusaha berinovasi untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang ada di bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kota Cimahi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2024 ini merupakan Laporan capaian Akuntabilitas Kinerja yang disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah kota Cimahi tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis tahun 2023 -2026 dan mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah disepakati antar Kepala Dinas Pangan dan Pertanian dengan Penjabat Wali kota Cimahi.

Secara keseluruhan terdapat lima Indikator Kinerja Utama yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian yaitu Nilai PPH Ketersediaan, Skor PPH Ketersediaan, Persentase Nilai PDRB Sektor Pertanian, Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian.

Pada tahun 2024 Dinas Pangan dan Pertanian telah melaksanakan sepuluh program yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang dan 9 (sembilan) program teknis urusan wajib pangan, urusan pilihan pertanian dan perikanan dan kelautan. Adapun gambaran capaian kinerja sasaran strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi di Tahun 2024 di ranah pencapaian kinerja eselon II, dari 5 (lima) indikator sasaran strategis terdapat 4 (empat) indikator yang tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian pada tahun 2024 terdapat 4 (empat) indikator yang capaiannya sangat baik/melebihi target yang telah ditetapkan adalah : (1) Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian dengan capaian kinerja sebesar 262,4%, (2). Skor PPH Ketersediaan dengan capaian kinerja sebesar 137,2 dan (3). Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan dengan capaian kinerja sebesar 100% dan

(4).Persentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian dengan capaian kinerja sebesar 287,88%. Sedangkan capaian yang belum maksimal terdapat pada 1 (satu) indikator yaitu Nilai PPH Ketersediaan dengan capaian kinerja sebesar 93,02%.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024 dianggarkan biaya sebesar Rp. 18.838.991.085, dan telah direalisasikan sebesar Rp. 17.631.560.227,- atau sebesar 93,59%, terdapat efesiensi sebesar 6,41% atau sebesar Rp. 1.207.430.858, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi sudah cukup baik.

Secara umum hampir keseluruhan pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) dan indikator program pada tahun 2024 sudah tercapai dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi/kemitraan yang telah selama ini dilaksanakan, baik kolaborasi dengan unsur pemerintah, akademisi, seluruh komunitas bidang pertanian, perikanan dan peternakan, pengusaha dan unsur lainnya, untuk selanjutnya tetap harus dilakukan koordinasi dan evaluasi dengan para stakeholder terkait tentang cara pencapaian sasaran strategis/indikator kinerja utama maupun indikator program lainnya agar capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian lebih optimal di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2024, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah, pada laporan ini tergambarkan pencapaian indikator program secara menyeluruh serta penjelasan serta alasan keberhasilan maupun ketidakberhasilan atas capaian yang telah ditetapkan. Namun demikian intisari dari laporan ini menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi perangkat daerah khususnya maupun para pihak yang membutuhkan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program serta untuk mewujudkan upaya penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan diambil di masa depan.

Laporan ini terwujud karena adanya dukungan dari semua pihak yang telah membantu memberikan data pendukung, masukan dan saran, kritikan yang membangun. Semoga dengan integritas yang kita miliki dalam menjaga eksistensi akuntabilitas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi akan menjadi sinergitas yang baik yang mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Cimahi yang lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan program kegiatan sebagai tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

Cimahi, 31 Januari 2025



TITA MARIAM, S.Pt, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197007061998032006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi maka terbentuklah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, dimana sebelumnya merupakan salah satu bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian (Diskopindagtan) Kota Cimahi, yaitu Bidang Pertanian.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.

Penyusunan LKIP Dinas Pangan dan Pertanian mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukan penyusunan LKIP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2024 adalah merupakan wujud konkrit pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stake holder) atas kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengalokasian anggaran dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran Dispan dan Pertanian Kota Cimahi, yang telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas RPD Kota Cimahi tahun 2023-2026 yang tujuannya adalah :

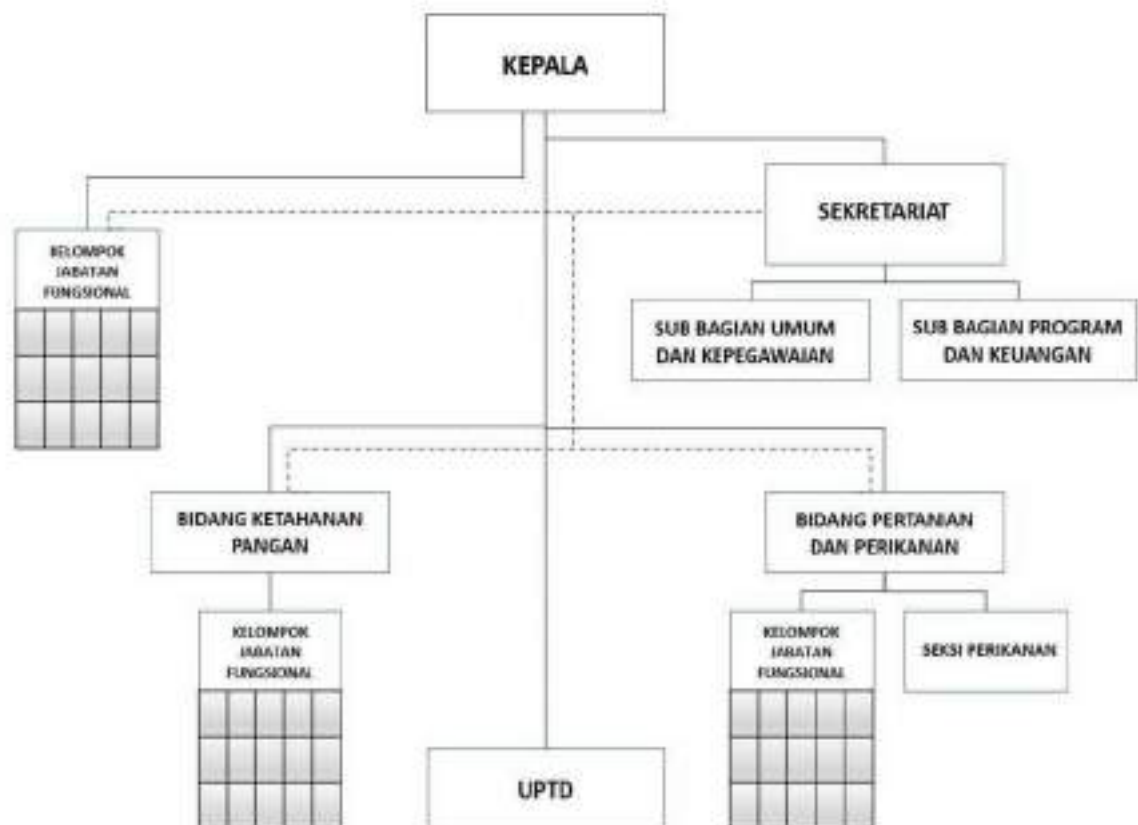
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatkan transparansi;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan strategis;
4. Mengetahui dan menilai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Perangkat daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota tersebut maka Dinas Pangan dan Pertanian melaksanakan Tugas Pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan urusan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, sedangkan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian adalah:

1. Perumusan kebijakan urusan pangan, pertanian dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan urusan pangan, pertanian dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pangan dan Pertanian; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh beberapa Kepala Bidang dan Pejabat Struktural lainnya sebagaimana tergambar pada Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

1.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Dengan mengetahui isu strategis, Perangkat Daerah dapat menganalisis bagian tertentu yang harus dimaksimalkan secara optimal, penerapan strategi yang relevan serta menentukan arah pengembangan organisasi. Pengidentifikasian isu-isu strategis juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja

organisasi. Isu-isu strategis di bidang pangan, pertanian dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Cimahi;
2. Masih belum optimalnya kualitas pembangunan ekonomi di Kota Cimahi;
3. Pengendalian inflasi di Kota Cimahi;
4. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah;
5. Fluktuasi harga pangan;
6. Terus meningkatnya jumlah alih fungsi lahan;
7. Masih dijumpai kasus gizi di Kota Cimahi baik kecukupan maupun kualitasnya;
8. Masih minimnya regulasi yang implementatif untuk mendukung pelaksanaan tugas urusan pangan, pertanian dan perikanan;
9. Dukungan perubahan UPTD, Puskesmas menjadi BLUD;
10. Pendataan dan pemutakhiran data terkait urusan pangan, pertanian dan perikanan Kota Cimahi; dan
11. Sinergitas dan koordinasi antar SKPD dalam dukungan Ketahanan Pangan Kota Cimahi.

Tujuan kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026 ditetapkan sebagai indikator Kinerja Utama Kota yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
4. Menurunnya Angka Kemiskinan;

5. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
6. Meningkatkan Ketahanan Bencana;

Penetapan ketujuh indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan IKU kota juga dilakukan untuk menuntaskan permasalahan permasalahan kota yang selanjutnya menjadi Isu Strategis Kota. Indikator Sasaran yang disusun selanjutnya akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang akan muncul dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), sehingga keselarasan Dokumen RPD dan Renstra Perangkat Daerah di Kota Cimahi diharapkan akan tercapai.

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen LKIP disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Tata cara Riviui atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139) Tanggal 1 Juli 2022.

1.6 Sistematika LAKIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini memuat gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penulisan doukumen LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini memuat Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini memuat Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah langkah di masa yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Dispangtan Kota Cimahi.

LAMPIRAN

Pada bagian ini disajikan bagan struktur organisasi, cascading/pohon kinerja, perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, foto-foto penghargaan yang diperoleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Indikator Kinerja Utama

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang efektivitas, efisiensi, dan sasaran kegiatan pembangunan maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan memiliki dokumen perencanaan yang bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), RPJMD yang selaras dengan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025 yang merupakan penjabaran dari RPJP Nasional. RPJMD yang didalamnya terdapat penjabaran visi dan misi dari Kepala Daerah terpilih yang kemudian harus selaras dalam perencanaan perangkat daerah lalu diselaraskan dan menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang Kota Cimahi, yaitu :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat berahlak mulia, berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial, produktif dan unggul;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing serta berbasis inovasi daerah;
4. Mewujudkan keserasian pembangunan yang berkeadilan;
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan

sasaran serta strategi pembangunan pencapaian visi misi tersebut lebih terarah, efektif dan efisien. Selanjutnya Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan urusan yang diamanatkan kemudian menjabarkan visi misi tersebut dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan demi bersama-sama mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi.

Visi Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPD Kota Cimahi Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut,

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPD Kota Cimahi 2023 - 2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Cimahi Kota Cerdas	1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
			Meningkatnya pengarusutamaan gender
			Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak
			Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota
		Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
			Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
			Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan
	2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya keswadayaan Masyarakat
			Meningkatnya

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
			Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah
			Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
	3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah
			Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan
			Meningkatnya kesempatan kerja
	4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
	5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	Berkurangnya luasan banjir
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan
			Meningkatnya Kualitas Permukiman
			Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas
			Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			Terwujudnya Kesesuaian

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
			Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi
			Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
		Meningkatkan Ketahanan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Bencana

Sumber : RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi mendukung pada pencapaian : (1) Misi ke 2 yaitu : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”, (2) Misi ke-3 yaitu : “Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah” dan (3) Misi Ke 4 yaitu : “Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan”, yang diukur dengan indikator sasaran : (1) Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik, (2) Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan dan (3) Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

Tujuan Jangka menengah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi selama 4 tahun (2023 – 2026) adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi dan Menurunnya Angka Kemiskinan. Indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Pertanian di Tahun 2024 merupakan turunan dari indikator sasaran RPD 2023 – 2026 Kota Cimahi yang kemudian akan menaungi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. IKU 2023 Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis (IKU) Dispangtan Tahun 2024

No.	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
1		Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	30 Nilai
Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi					
2		Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	2. Nilai PPH Ketersedian	2350 Nilai
				3. Skor PPH Ketersedian	68 Nilai
				4. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,32 persen
Misi 4 : Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan					
3		Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	5. Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen

Sumber : RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi merupakan janji Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi kepada Kepala Daerah/Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan beserta indikator dan targetnya sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Untuk lebih menajamkan pencapaian tujuan Kota Cimahi maka sasaran, program beserta indikator target menjadi komponen dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Dispangtan Kota Cimahi Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	30 Nilai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
2	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	2. Nilai PPH Ketersedian	2350 Nilai
		3. Skor PPH Ketersedian	68 Nilai
		4. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,32 persen
3	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	5. Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen

Tabel 2.4
Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi energi dan protein	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) dan Protein perkapita (gram/kap/hari)	E. 2.350 P. 67,9
	Konsumsi energi perkapita (kkal/kap/hari) dan protein perkapita (gram/kap/hari)	E. 2.093,9 P. 61,9
Berkurangnya wilayah rentan rawan pangan	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin (persen)	100
Terkendalinya Mutu dan Keamanan Pangan	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (persen)	80
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	290
	Jumlah produksi ikan hias (ekor)	2.375.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya produktivitas pelaku usaha pengolaha perikanan	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan (persen)	2
meningkatnya luas lahan pertanian berkelanjutan milik pemerintah	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan (persentase dokumen persiapan)	30
Terkendalnya wilayah dari penyakit zoonosis	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kelurahan yang dilayani)	100
Meningkatnya pelaku usaha pertanian yang berizin	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani (persen)	100
Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Petani	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	10
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	BB
	Nilai IKM Perangkat Daerah	81,5
	Indeks Profesionalitas ASN	68,5

Adapun dukungan pendanaan pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan sasaran program dispangtan Tahun 2024 tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Program dan Pendanaan yang mendukung pencapaian sasaran strategis
Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 10.646.755.649,00
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 1.156.887.946,00
3.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp. 2.697.888.750,00
4.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 76.982.600,00
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 825.365.213,00
6.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp. 241.563.300,00
7.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 43.104.000,00
8.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp. 929.163.377,00
9.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp. 3.984.000,00
10.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 2.217.296.250,00
	TOTAL ANGGARAN	Rp18.838.991.085,00

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. Rp18.392.030.911,00,- kemudian dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perubahan kebijakan dari instansi vertikal

dan kebijakan Kepala Daerah berupa kebijakan terkait dukungan penanganan inflasi daerah, penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan, sehingga diperlukan penyesuaian penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui mekanisme APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2024, anggaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi mengalami perubahan menjadi Rp. Rp18.838.991.085,00,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

3.1.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja pada tahun 2024, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dan target yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Capaian kinerja merupakan hasil capaian yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target dan realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024 yang merupakan tahun kedua Renstra 2023 – 2026, Dinas Pangan dan Kota Cimahi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis untuk 3 (tiga) urusan yaitu urusan pangan, pertanian dan perikanan dan kelautan, dan terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU), metode pengukuran/formulasi yang digunakan untuk menghitung pencapaian kinerja IKU TA. 2024 seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran/fomulasi capaian IKU Dinas Pangan dan Pertanian Kota
Cimahi TA. 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh Tim Reformasi birokrasi Kota Cimahi dengan komponen penilaian terdiri dari unsur : organisasi, tatalaksana, perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Dispangtan, Tim RB Kota Cimahi
Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	2. Nilai PPH Ketersedian	Hasil kalkulasi data aplikasi Harmonisasi analisis nilai PPH (Susenas), hasil inputing data konsumsi masyarakat Cimahi per kapita per minggu selama satu tahun.	Dispangtan, Susenas
	3. Skor PPH Ketersedian	Hasil kalkulasi data aplikasi Harmonisasi analisis nilai PPH (Susenas), hasil inputing data konsumsi masyarakat Cimahi per kapita per minggu selama satu tahun.	Dispangtan, Susenas
	4. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	Hasil perhitungan dan publikasi BPS	KCDA, BPS
Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	5. Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	Perbandingan antara target dan realisasi pelaksanaan penanganan intervensi rawan pangan.	Dispangtan

3.1.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dikarenakan tahun 2023 merupakan awal tahun pertama periode Renstra Dispangtan 2023-2026 maka akan disajikan perbandingan perubahan indikator yang merupakan penyesuaian indikator turunan dari RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pangan dan Pertanian
Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (Nilai)	30	78,74	262,4
2.	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	2. Nilai PPH Ketersedian	2350	2186	93,02
		3. Skor PPH Ketersedian	68	93,3	137,2
		4. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,32	3,80	287,88
3.	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	5. Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100	100	100

Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian pada tahun 2024

terdapat 4 (empat) indikator yang capaiannya sangat baik/melebihi target yang telah ditetapkan adalah : (1) Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian dengan capaian kinerja sebesar 262,4%, (2). Skor PPH Ketersediaan dengan capaian kinerja sebesar 137,2 dan (3). Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan dengan capaian kinerja sebesar 100% dan (4).Persentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian dengan capaian kinerja sebesar 287,88%.

Sedangkan capaian yang belum maksimal terdapat pada 1 (satu) indikator yaitu Nilai PPH Ketersediaan dengan capaian kinerja sebesar 93,02%.

Perbandingan capaian sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Strategis Dinas Pangan dan Pertanian dengan Capaian Rata-rata Provinsi dan Nasional Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Capaian 2024	Capaian Rata-rata Provinsi Jawa Barat	Capaian Rata-rata Nasional
1.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	6. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (Nilai)	78,74	98,64	-
2.	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	7. Nilai PPH Ketersedian	2186	-	3494
		8. Skor PPH Ketersedian	93,3	95,12	98,92
		9. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	3,80	1,79	-

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Capaian 2024	Capaian Rata-rata Provinsi Jawa Barat	Capaian Rata-rata Nasional
3.	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	10.Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100	100	100

Adapun capaian kinerja program target dan realisasi kinerja bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Program Dinas Pangan dan Pertanian
Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi energi dan protein	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) dan Protein perkapita (gram/kap/hari)	E. 2.350 P. 67,9	E. 2.186 P. 75,7	93 111,5
	Konsumsi energi perkapita (kkal/kap/hari) dan protein perkapita (gram/kap/hari)	E. 2.095 P. 62,5	E. 1.994 P. 60,7	95,2 97,1
Berkurangnya wilayah rentan rawan pangan	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin (persen)	100	100	100
Terkendalinya Mutu dan Keamanan Pangan	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (persen)	70	98	140

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	290	290,36	100,12
	Jumlah produksi ikan hias (ekor)	2.375.000	2.479.098	100,37
Meningkatnya produktivitas pelaku usaha pengolah perikanan	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan (persen)	2	2	100
meningkatkan luas lahan pertanian berkelanjutan milik pemerintah	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan (persentase dokumen persiapan)	30	30	100
Terkendalnya wilayah dari penyakit zoonosis	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kelurahan yang dilayani)	100	100	100
Meningkatnya pelaku usaha pertanian yang berizin	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani (persen)	100	140	140
Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Petani	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	6	15	250
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	BB	-	Data belum release
	Nilai IKM Perangkat Daerah	81,5	82,4	101,1
	Indeks Profesionalitas ASN	68,5	80	116,8

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Perbandingan indikator kinerja Tahun 2024 Dinas Pangan dan Pertanian dengan periode tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra tampak pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan indikator dan capaian sasaran strategis Dispangtan Tahun 2023 - 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya (2021)	Capaian		% Capaian	Target (2026)	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Renstra Tahun 2026 (%)
				2023	2024			
1.	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	22,79	77,05	78,74	102,21	40	196,85
2	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Nilai PPH Ketersediaan	2136	2183	2186	100,14	2380	91,85
		Skor PPH Ketersediaan	90,4	89,6	93,3	104,13	68	137,2
		Persentase Peningkatan Nilai POBB Sektor Pertanian (Persen)	-2,90	1,55	3,80	287,88	1,33	285,71
3	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kewirausahaan pangan	100	100	100	100	100	100

Tingkat capaian sasaran strategis ke 1 yang di ukur dari indikator **Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian**, jika dibandingkan dengan tingkat capaian sasaran tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 102,21%, dan tercapai 196,9% dari target akhir sasaran Renstra di tahun 2026, digambarkan dengan infografis sebagai berikut :

Gambar 3.1
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan Tahun 2023
(Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dispangtan)



Gambar 3.2
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra
(Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dispangtan)



Nilai evaluasi reformasi birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian merupakan hasil evaluasi yang dihasilkan dari penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pangan dan Pertanian yang dinilai dari unsur : organisasi, tatalaksana, perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Capaian nilai evaluasi reformasi birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian pada tahun 2024 bisa terlaksana dengan baik dengan capaian kinerja 102,21% dari capaian tahun 2023 dengan nilai sebesar 77,0 dan capaian di tahun 2024 sebesar 78,74. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2026 sudah tercapai 196,85%.

Tingkat capain sasaran strategis ke 2 (dua) indikator ke 1 (satu) yaitu **Nilai PPH Ketersediaan**, mengalami kenaikan dari

tahun 2023 sebesar 100,14%, dari target akhir sasaran Renstra di Tahun 2026 sudah tercapai 196,9%. Capaian indikator ke 2 (dua) yaitu **Skor PPH Ketersediaan**, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 104,13%, dari target akhir sasaran renstra di tahun 2026 sudah tercapai 137,2%. Capaian PPH Ketersediaan bisa digambarkan dengan infografis sebagai berikut :

Gambar 3.3
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan Tahun 2023
(Nilai PPH Ketersediaan)



Gambar 3.4
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra
(Nilai PPH Ketersediaan)



Nilai PPH ketersediaan adalah angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi ketersediaan pangan di suatu wilayah. Nilai ini diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi. PPH atau Pola Pangan Harapan adalah metode untuk menilai ketersediaan pangan di wilayah tertentu. PPH dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat berdasarkan kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari

keragaman berdasarkan pola pangan harapan (PPH). PPH ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi. Tingkat keragaman dan ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keragaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan. Capaian Nilai PPH Ketersediaan Kota Cimahi pada tahun 2024 tercapai dengan baik dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja 100,14% dari capaian tahun 2023 sebesar 2.183 nilai dan terealisasi sebesar 2.186 nilai.

Tingkat capain sasaran strategis ke 2 (dua) indikator ke 2 (dua) yaitu **Skor PPH Ketersediaan**, untuk capaian tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 104,13% dan dari target akhir sasaran Renstra di Tahun 2026 sudah tercapai 196,9%. Capaian indikator ke 2 (dua) yaitu **Skor PPH Ketersediaan**, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 104,13%, dari target akhir sasaran renstra di tahun 2026 sudah tercapai 137,2%. Capaian PPH Ketersediaan bisa digambarkan dengan infografis sebagai berikut :

Gambar 3.5
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan Tahun 2023
(Skor PPH Ketersediaan)



Gambar 3.6
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra
(Skor PPH Ketersediaan)



Skor PPH ketersediaan merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Capaian skor PPH Ketersediaan Kota Cimahi pada tahun 2024 tercapai dengan baik dengan capaian kinerja 104,13% dari target skor sebesar 89,6 bisa terealisasi sebesar 93,3.

Tingkat capaian sasaran strategis ke 2 (dua) indikator ke 3 (tiga) yaitu **Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian** dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -0,23% dengan capaian 85,1%, dan dari target akhir sasaran renstra di tahun 2026 sudah tercapai 99,2%.

Gambar 3.7
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan Tahun 2023
(Persentase Nilai PDRB Sektor Pertanian)



Gambar 3.8
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra
(Persentase Nilai PDRB Sektor Pertanian)



Nilai PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan produksi pertanian dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Komponen PDRB sektor pertanian: Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Jasa pertanian dan perburuan. PDRB sektor pertanian dihitung dengan menjumlahkan nilai output bersih yang tercipta di wilayah domestik dalam periode waktu tertentu. Komoditas dihitung pada harga berlaku. Capaian persentase nilai PDRB sektor pertanian pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya turun sebesar 17,2% dengan capaian kinerja 85,1% dari capaian tahun 2023 sebesar 1,55 dan capaian tahun 2024 sebesar 1,32 skor.

Tingkat capaian sasaran strategis ke 3 yang di ukur dari indikator **Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan** jika dibandingkan dengan tingkat capaian sasaran tahun 2023 juga tercapai juga di tahun 2024 sebesar 100%, dan tercapai juga dari target akhir sasaran Renstra di tahun 2026.



Selama tahun 2024 Dispangtan telah melaksanakan intervensi rawan pangan untuk masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/ masyarakat yang tergolong rentan secara sosial ekonomi, yang terkonsentrasi untuk penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kasus stunting di Kota Cimahi. Bantuan berupa beras fortifikasi, susu dan telur yang diberikan untuk ibu hamil dan menyusui dan bayi dibawah 2 tahun (baduta).

Capaian Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan pada tahun 2024 bisa terlaksana dengan baik dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% .

Tabel 3.5
Realisasi Tahun 2024 dengan Target RPD dan Renstra 2023 - 2026

INDIKATOR	TARGET RPD 2024	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) dan Protein perkapita (gram/kap/hari)	E. 2.350 P. 67,9	E. 2.350 P. 67,9	E. 2.186 P. 75,7	93 111,5
Konsumsi energi perkapita (kkal/kap/hari) dan protein perkapita (gram/kap/hari)	E. 2.095 P. 62,5	E. 2100 P. 57	E. 1.994 P. 60,7	95,2 97,1

INDIKATOR	TARGET RPD 2024	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin	100	100	100	100
Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (persen)	70	70	98	140
Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	290	290	290,36	100,12
Jumlah produksi ikan hias (ekor)	2.375.000	2.375.000	2.479.098	100,37
Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan (persen)	2	2	2	100
Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan (persentase dokumen persiapan)	30	30	30	100
Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kelurahan yang dilayani)	100	100	100	100
Persentase izin usaha pertanian yang dilayani (persen)	100	100	140	140
Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	6	6	15	250
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	88	88	-	Data belum release
Nilai IKM Perangkat Daerah	80,5	81,5	82,4	101,1
Indeks Profesionalitas ASN	46	68,5	80	116,8

3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator-indikator program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian tentu sangat dipengaruhi oleh daya dukung sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya kemitraan/kolaborasi (crosscutting).

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi per 30 Desember 2024 adalah sebanyak 78 orang, yang terdiri dari ASN dan PPPK sebanyak 51 orang, tenaga THL 26 orang dan THL Provinsi sebanyak 1 orang.

Efisiensi SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan tantangan di dalam perangkat daerah. Krisis pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan tingkat pekerjaan yang semakin menumpuk harus bisa membangun kinerja dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang efektif. Efisiensi SDM, tidak hanya mengatur jumlah tenaga kerja di setiap posisi. Namun, efisiensi SDM juga tentang pencapaian seluruh aspek tugas pokok dan fungsi suatu perangkat daerah. Dapat diasumsikan jika produktifitas sumber daya manusia pada suatu perangkat daerah tinggi, maka efisiensinya juga akan tinggi. Dapat dihitung juga dengan membandingkan antara input dan output. Namun, selain SDM banyak juga faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas. Diantaranya yaitu : waktu dan biaya serta kondisi lingkungan.

2. Sumber Daya Anggaran dan Pembiayaan

Dukungan pendanaan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi pada tahun 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp18.392.030.911 lalu pada bulan Oktober 2024 disusunlah APBD Perubahan (APBD-P) 2024 sebagai upaya penyesuaian-penyesuaian terhadap Program,

Ringkasan anggaran pada tahun 2024 Dispangtan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Ringkasan anggaran Dispangtan Tahun 2023

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp.325.650.000	Rp.325.650.000
Retribusi Daerah	Rp.325.650.000	Rp.325.650.000
Jumlah Pendapatan	Rp.325.650.000	Rp.325.650.000
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI	Rp. 18.024.493.911	Rp. 18.322.800.985
Belanja Pegawai	Rp. 8.775.212.615	Rp. 8.925.212.615
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 9.249.281.296	Rp. 9.397.588.370
BELANJA MODAL	Rp367.537.000	Rp516.190.100
Belanja modal peralatan dan mesin	Rp.317.537.000	Rp256.916.000
Belanja modal gedung dan bangunan	0	Rp249.274.100,00
Belanja modal aset tetap lainnya	Rp50.000.000,00	0
Jumlah Belanja	Rp18.392.030.911	Rp18.838.991.085

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja Sasaran Strategis pada Tabel berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (Nilai)	262,4	97,39%	2,61%
2	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Nilai PPH Ketersedian (Nilai)	93,02	90%	Tidak ada efisiensi
		Skor PPH Ketersedian (Nilai)	137,2		
		Persentase Peningkatan	100		

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
		Nilai PDRB Sektor Pertanian (Persen)			
3	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan (Persen)	100	85,37%	14,63%

Berdasarkan tabel 3.7 di atas tampak bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terdapat pada sasaran strategis (1) Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik, yang mana terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,61%, (2) sasaran Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah terdapat efisiensi sebesar 14,63%, akan tetapi untuk indikator sasaran strategis Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan tidak terdapat efisiensi dikarenakan ada salah satu indikator tidak tercapai.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam rangka pencapaian indikator strategis adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendorong

- Pangan merupakan kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi;
- Kondisi ekonomi, politik, sosial, keamanan yang baik akan mendukung ketahanan pangan;
- Jumlah angkatan kerja yang cukup merupakan modal dasar pengembangan pertanian;
- Indonesia berada di zona iklim tropis ekuatorial yang ditandai dengan suhu udara tahunan yang tinggi;

- Perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan benih berkualitas tinggi dan teknologi mendukung ekonomi agrikultur;
- Hasil pertanian perikanan dan peternakan yang berkualitas dapat mendukung pertanian modern dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penghambat

- Ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahun dan antar wilayah;
- Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah;
- Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat;
- Konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- Kurangnya infrastruktur penyimpanan cadangan pangan daerah;
- Petani dan pengolah pangan masih kekurangan pengetahuan tentang teknik pasca panen yang baik;
- Penerapan teknologi pasca panen yang masih rendah;
- Semakin menurunnya luas lahan pertanian karena alih fungsi lahan dan daya dukung alam;
- Cuaca ekstrem, kekeringan, dan banjir melanda berbagai daerah;
- Tantangan sumber daya air;
- Kondisi ekonomi, sosial, ekonomi yang tidak begitu baik maka akan berdampak ke sektor lainnya yang dapat merugikan masyarakat.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Kinerja yang baik tentu saja harus didukung oleh sarana prasarana penunjang kinerja yang baik. Sarana dan prasarana di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi beserta kondisinya bisa dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Kondisi Sarana prasarana Dispangtan Tahun 2024

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
1.	Alat Berat				
	1. Pompa Air	2 Unit	Baik		
	2. Pompa Airasil	2 Unit	2 Unit Rusak	2 Unit	
	3. Pompa Lain-lain	4 Unit	Baik		
	4. Portable Water Pump	1 Unit	Baik		
	5. Tractor Lain-lain	1 Unit	Baik		
	6. Transportable Water Pump	2 Unit	2 Unit Rusak	2 Unit	
2.	Alat Angkutan				
	1. Roda 4	4 Unit	Baik	4 Unit	
	2. Roda 3	2 Unit	2 Rusak Berat		
	3. Roda 2	5 Unit	Baik	6 Unit	
3.	Alat- alat Kantor dan Rumah Tangga :				
	1. AC	13 Unit	1 Unit Rusak	18 Unit	
	2. Air Blower	10 Unit	Baik		
	3. Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1 Unit	Baik		
	4. Alat Kedokteran Poliklinik Lain-lain	17 Unit	Baik		
	5. ALat Kedokteran Umum Lain Lain	15 Unit	Baik		
	6. Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	1 Unit	Baik		
	7. Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	3 Unit	Baik		
	8. Alat Laboratorium Umum Lain-lain	3 Unit	Baik		
	9. Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	2 Unit	Baik		
	10. Alat Pasca Panen Lain-lain	4 Unit	Baik		
	11. Alat Pemadam Kebakaran (Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain)	79 Unit	Baik		
	12. Alat Pemadam/Portable	1 Unit	Baik		
	13. Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	30 Unit	Baik		
	14. Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	22 Unit	Baik		
	15. Alat Pengering (Dryer)	1 Unit	Baik		
	17. Alat Pengukur Curah Hujan	1 Unit	Rusak		
	18. Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	4 Unit	Baik		
	19. Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	3 Unit	Baik		
	20. Alat Perontokan (Thresher Pedal)	5 Unit	Baik		
	21. Alat Perontokan Mesin (Power Thresher)	1 Unit	Baik		
	22. Alat Processing Lain-lain	1 Unit	Baik		
	23. Alat Produksi Perikanan Lain-lain	9 unit	Baik		
	24. Alat Rumah Tangga Lain-lain	6 Unit	Baik		

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
25	Alat Timbangan Lain-lain	14 Unit	Baik		
26	Alat Ukur	1 Unit	Baik		
27	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	3 Unit	Baik		
28	Alat-alat Peternakan Lain-lain	12 Unit	Baik		
29	Angkutan Barang Lain-lain	2 Unit	2 Unit Rusak	1 Unit	
30	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54 Unit	Baik		
31	Bak Aquarium	40 Unit	Baik		
32	Bak Fiberglass	27 Unit	Baik		
33	Bak Pemeliharaan Sementara	18 Unit	Baik		
34	Beater Unit (Mesin Penggiling)	1 Unit	Baik		
35	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Mikrobiologi)	1 Unit	Baik		
36	Brandkas	1 Unit	Baik		
37	CCTV dan Perlengkapannya	2 Tempat	Baik		
39	Centrifuga	2 Unit	2 Unit Rusak	2 Unit	
40	Coffee Maker	1 unit	Baik		
41	Container	1 Unit	1 Unit Rusak		
42	CPU (Peralatan Personal Komputer)	29 Unit	15 Unit Rusak	38 Unit	
43	Desicator	2 Unit	Baik		
44	Disk Pack (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit	1 Unit Rusak		
45	Dispenser	3 Unit	Baik		
46	Display (Rak)	2 Unit	Baik		
47	Electric Generating Set Lain-lain	1 Unit	Baik		
48	Elmeyer Glass	4 Unit	Baik		
49	Facsimile	2 Unit	2 Unit Rusak	1 Unit	
50	Filing Cabinet Besi	21 Unit	4 Unit Rusak		
51	Filter	4 Unit	Baik		
52	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	1 unit	1 Unit Rusak		
53	Freezer 70 Derajat C Centrifuge With Accesories	1 unit	1 Unit Rusak		
54	Gas Regulator	4 Unit	Baik		
55	Grinder	1 unit	Baik		
56	Gunting Lurus	1 unit	Baik		
57	Handy Cam	1 unit	Baik		
58	Handy Talky (HT)	8 Unit	Baik		
59	Kapal Terbang Sayap Tetap Mesin Turbin (Fuel Jet)	1 unit	Baik		
62	Kipas Angin	1 Unit	1 Unit Rusak		
63	Kitchen Set	2 Unit	Baik		
64	Kursi Biasa	9 Unit	Baik		
65	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik		
66	Kursi Kayu	50 Unit	Baik		
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	Baik		
68	Kursi Lipat	3 unit	Baik		
69	Kursi Rapat	136 Unit	Baik		
70	Kursi Tamu	2 Unit	2 Unit Rusak	3 Set	
71	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik		
73	Lap Top/ Note Book	11 Unit	6 Unit Rusak	15 Unit	

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
74	Lemari Arsip (Besi & Kayu)	18 Unit	4 Unit Rusak		
77	Lemari Es	9 Unit	3 Unit Rusak		
80	Lemari Pakai	3 unit	Baik		
82	Magnetic Ferofilter	1 unit	Baik		
83	Mayor Surgeri Set	1 unit	Baik		
84	Meja Biro	21 Unit	5 Unit Rusak		
85	Meja Kerja Besi/Metal	5 Unit	Baik		
86	Meja Kerja Kayu	7 Unit	Baik		
87	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	40 Unit	Baik		
88	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Unit	Baik		
89	Meja Makan Kayu	2 Unit	Baik		
90	Meja Periksa Pasien	3 Unit	Baik		
91	Meja Rapat	7 Unit	Baik		
92	Meja Tambahan	2 Unit	Baik		
93	Mesin Absensi	2 Unit	Baik		
94	Mesin Bor Tangan	1 Unit	Baik		
96	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	4 Unit	Baik		
97	Mesin Las Listrik	1 Unit	Baik		
98	Mesin Pemotong Rumput	6 Unit	2 Unit Rusak		
99	Meubelair Lain-lain	1 Unit	Baik		
100	Microscope	5 Unit	Baik		
102	Minor Surgeri Set	3 Unit	Baik		
103	Mixer	1 Unit	Baik		
105	Mobile Operating Lamp	2 Unit	Baik		
106	Nebulizer	1 Unit	1 Unit Rusak	3 Unit	
107	Needle Holder	2 Unit	Baik		
109	Operating Table Bedah	4 Unit	Baik		
110	Oven	1 Unit	Baik		
111	Overhead Projector	7 Unit	Baik		
113	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	10 Unit	Baik		
116	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	1 Unit	Baik		
119	Perkakas Standar Lain-lain	1 Unit	Baik		
121	Pesawat Telephone	3 Unit	3 Unit Rusak	1 Unit	
122	PH Meter	2 Unit	Baik		
123	Pick Up	1 Unit	Baik		Accessories Pick Up
128	Printer (Peralatan Mini Komputer)	25 Unit	17 Unit Rusak	35 Unit	
129	Rak Besi	3 Unit	Baik		
130	Rak Kayu	1 Unit	Baik		
131	Rak Pengering	1 Unit	Baik		
132	Rak Peralatan	1 Unit	Baik		
133	Refrigerator	1 Unit	1 Unit Rusak		
134	Rice Cooker (Alat Laboratorium Makanan)	1 Unit	Baik		
135	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 Unit	Baik	2 Unit	
138	Slicer	1 Unit	Baik		
139	Slide Projector (Lapangan)	1 Unit	Baik		

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
140	Sofa	5 unit	2 Unit Rusak		
141	Sound System	2 unit	Baik		
142	Stereo Generator Fm	1 Unit	1 Unit Rusak		
143	Sterilisator	3 Unit	1 Unit Rusak		
144	Tabung Gas	4 Unit	Baik		
145	Tabung Oksigen	8 Unit	Baik		
146	Tangga Aluminium	1 Unit	1 Unit Rusak	3 Unit	
147	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 Unit	2 Unit Rusak		
148	Televisi	9 Unit	2 Unit Rusak		
149	Tempat Tidur Kayu	3 Unit	Baik		
150	Termos A.I	5 Unit	5 Unit Rusak		
152	Timbangan	2 Unit	2 Unit Rusak		
153	Timbangan Bayi	3 Unit	1 Unit Rusak	6 Unit	
156	Tripod Camera	3 Unit	Baik		
157	Tustel	2 Unit	Baik		
158	USG	1 Unit	1 Unit Rusak	1 Unit	
159	Vacum Pump	30 Unit	30 Unit Rusak		
160	Water Filter	1 Unit	Baik		
161	Water Quality Analyzer System (Tester Kit)	3 Unit	Baik		
163	White Board	9 Unit	Baik		

4. Sumber Daya Kemitraan/Kolaborasi (Cross cutting)

Dalam rangka pencapaian program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada kerjasama dari berbagai pihak. Dalam mensukseskan program kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari konsep pentahelix yang merupakan gabungan dari 5 unsur. Unsur-unsur yang saling berkesinambungan dalam pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan. Kolaborasi yang telah dilaksanakan dari unsur Pemerintah, Akademisi, Komunitas bidang pertanian, perikanan dan peternakan, pengusaha dan unsur lainnya. Unsur-unsur kolaborasi yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Pangan dan Pertanian bisa digambarkan pada tabel (Cross Cutting) berikut ini :

Tabel 3.9
Kolaborasi/crosscutting Dinas Pangan dan Pertanian

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	Cross Cutting	
			Antar Bidang	Instansi Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya ketersediaan energi dan konsumsi energi dan protein	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) dan Protein perkapita (gram/kap/hari) Konsumsi energi perkapita (kkal/kap/hari) dan protein perkapita (gram/kap/hari)	Sekretariat, bidang Pertanian dan Perikanan	Disdagkoperin, UPT, Pasar, Bulog, KWT, Pembudidaya, BPBD, DP3AP2KBA, Dishub, Satpol PP, Admirek, Bulog dan PT, Pos, Bapanas
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Berkurangnya wilayah rentan pangan	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin (persen)	Sekretariat	Bappelitbangda, Dinkes, Dinsos, Disdukcapil, DP3AP2KBA, DPKP Prov Jabar
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terkendalinya Mutu dan Keamanan Pangan	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	Sekretariat, bidang Pertanian dan Perikanan	Disdagkoperin, UPT, Pasar
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	Sekretariat	Fakultas Perikanan dan Kelautan UNPAD, Pokdakam Sebandung Raya, Balai Riset Budidaya, Dines Kelautan dan Perikanan Prov Jabar, importir perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi ikan hias (ekor)	Sekretariat, bidang Pertanian dan Perikanan	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produktivitas pelaku usaha pengolahan perikanan	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan (persen)	Sekretariat dan bidang ketahanan pangan	Dinas Kelautan, dan Perikanan Prov Jabar, DP3AP2KBA dan Para UMKM Pengolah Ikan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	meningkatkan luas lahan pertanian berkelanjutan milik pemerintah	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	Sekretariat	Badang hukum satda, Unpad, dpmptsp, BPN, Kementerian Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terkendalinya wilayah dari penyakit zoonosis	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kelurahan yang dilayani)	Sekretariat	Dinkes, Balai veteriner, Subang, Bappeda, Bappelitbangda, Syncore BLUD, RS Hewan cilele, dkpp, fak kedokteran hewan unpad, SMK pangalengan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	Cross Cutting	
			Antar Bidang	Instansi Lainnya
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya pelaku usaha pertanian yang berizin	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani (persen)	Sekretariat	DPMPTSP, para pelaku usaha pertanian, perikanan dan peternakan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Petani	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	Sekretariat dan bidang ketahanan pangan	Petani, penyuluh pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar, Kementerian Pertanian
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Berkurangnya wilayah rentan rawan pangan	Persentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin (persen)	Sekretariat dan bidang pertanian dan perikanan	Bapenas, Dinkes, Dinsos, Admirek, Satpol PP, Dishub, BPBD,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	Bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian dan perikanan	Bappelitbangda, BPKAD, Inspektorat, Organisasi Pemerintahan, Adbang, Bappenda, Bagian Hukum, Diskominfo
		Nilai IKM Perangkat Daerah (nilai)		
		Indeks Profesionalitas ASN (nilai)		

3.3. Kendala dan Solusi

a. Kendala :

- Situasi ketersediaan setiap kelompok pangan di Kota Cimahi cenderung belum merata. Beberapa kelompok bahan makanan terjadi surplus/berlebih, namun ada juga yang masih defisit/kurang. Ketersediaan pangan yang surplus adalah kelompok padi-padian, lemak dan minyak, serta sayur dan buah. Sedangkan, kelompok pangan yang tersedia lebih rendah dari jumlah idealnya adalah umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta gula.
- Luas lahan pertanian di Kota Cimahi terus mengalami pengurangan akibat alih fungsi lahan yang terus terjadi.
- Masih tingginya kasus kerawanan pangan di Kota Cimahi;

- Ketidakakuratan data masyarakat yang terkena dampak kerawanan pangan;
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang sehat;

b. Solusi :

- Untuk menjamin ketersediaan pangan hal yang dilakukan adalah terus mengupayakan untuk peningkatan produktivitas tanaman dari sektor pertanian, melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, menjamin kelancaran distribusi dan rantai pasokan dengan Gerakan pangan murah (GPM), melaksanakan pembelian cadangan pangan pemerintah dan melaksanakan pemantauan harga untuk menjaga stabilisasi harga pangan di pasaran;
- Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil tanaman padi, hal yang diupayakan adalah merintis penetapan LP2B (Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) seluas 15,35 Ha, Intensifikasi pertanian (pengolahan tanah yang baik, penggunaan varietas unggul baru, pemupukan yang berimbang, pengairan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, penerapan teknologi tepat guna (Biogro, vertikultur, hidroponik, hidroponik, budikdamber, padi polybag, Uji varietas tanaman, meningkatkan inovasi di bidang pertanian, perikanan dan peternakan untuk memudahkan pencapaian target program dan kegiatan;
- Memberikan sosialisasi akan pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang sehat melalui kampanye edukasi dan sosialisasi.
- Melaksanakan intervensi kerawanan pangan terutama bagi anak-anak yang terkena stunting.

3.4. Prestasi dan Inovasi Dinas Pangan dan Pertanian

Prestasi Dinas Pangan dan Pertanian yang dicapai pada Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	TANGGAL	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	TINGKAT	PERINGKAT	PEMBERI PENGHARGAAN	LOKASI
1	7 Maret 2023	Peringkat Kedua Terbaik Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan & Kesehatan Hewan di Jawa Barat Tahun 2023	Organisasi Perangkat Daerah	Jawa Barat	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Bandung
2	17 Agustus 2023	Penghargaan Abdibaktitani Tingkat Nasional dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk UPTD Puskeswan sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi UTAMA	UPTD	Tingkat Nasional	1	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Jakarta
3	1 September 2023	Juara 1 Lomba Olahan Serba Ikan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Organisasi Perangkat Daerah	Jawa Barat	1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Bandung
4	2 September 2023	Predikat Khusus Perangkat Daerah Terinovatif Tahun 2023 Pada Kompetisi Chima Motekar Award Tahun 2023	Organisasi Perangkat Daerah	Kota Cimahi	1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Cimahi
5	2 September 2023	Juara 2 Chima Motekar Award Kelompok Peserta 1 Perangkat Daerah dengan Judul Inovasi SIMANTRI an. Mita Mustikasari, SPt, MM	Perangkat Daerah	Kota Cimahi	2	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Cimahi
6	2 September 2023	Juara 3 Chima Motekar Award Kelompok Peserta 1 Perangkat Daerah dengan Judul Inovasi BIOGRO Siti Rakhmah Tentrisui Pakki, ST, MT,	Perangkat Daerah	Kota Cimahi	3	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Kota Cimahi

No.	TANGGAL	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	TINGKAT	PERINGKAT	PEMBERI PENGHARGAAN	LOKASI
7	19 Desember 2023	Juara 1 Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Organisasi Perangkat Daerah	Jawa Barat		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Sukabumi
8	20 Desember 2023	Piagam Penghargaan Wali Kota Cimahi kepada Atas Komitmen dan Konsistensi dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi	Organisasi Perangkat Daerah	Kota Cimahi	-	Wali Kota Cimahi	Kota Cimahi
9	22 Des 2023	UPTD Puskesmas Juara 1 Puskewan Terbaik Jawa Barat Tahun 2023	UPTD	Jawa Barat	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Bandung
10	22 Des 2023	Dinas Pangan dan Pertanian Juara 2 Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan dan Keswan Jawa Barat Tahun 2023	Organisasi Perangkat Daerah	Jawa Barat	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Bandung
11	22 Des 2023	Juara 3 Pelapor ISHIKNAS Terbaik Jawa Barat An. Drh Aldis	Perangkat Daerah	Jawa Barat	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Bandung
12	1 Maret 2024	Juara 2 Kompetisi Inovasi Cimahi Innovation Hackathon Days 2024 An. Drh. Muhamad Faiz Labib	Perangkat Daerah	Kota Cimahi	2	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Cimahi
13	15 Mei 2024	Juara 2 Lomba Memasak Menu Pangan Lokal Mewakili Provinsi Jawa Barat dalam rangka Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Nasional	2	Badan Pangan Nasional Kementrian Pertanian Republik Indonesia	Solo

No.	TANGGAL	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	TINGKAT	PERINGKAT	PEMBERI PENGHARGAAN	LOKASI
		ke 52 dan Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2024					
14	23 Agustus 2024	Juara Favorit 2 Sayembara Memasak Antar Pimpinan Daerah (Samara) Tahun 2024	Organisasi Perangkat Daerah	Jawa Barat	2	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat	Bandung
15	27 Agustus 2024	Organisasi Perangkat Daerah Terbaik Ke-3 dalam Pengelolaan Statistik Sektoral Kota Cimahi Tahun 2024, PIC. Erni Nurlaelawati, S.IP	Organisasi Perangkat Daerah	Kota Cimahi	3	Badan Pusat Statistik Kota Cimahi	Cimahi
16	16 Nov 2024	Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Nasional	A	Badan Pangan Nasional Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Bandung
17	16 Nov 2024	Juara 2 Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Jawa Barat	Organisasi Perangkat Daerah	Jawa Barat	2	Provinsi Jawa Barat	Bandung
18	1 Oktober 2024	Juara 1 Chima Motekar Award Kelompok Peserta 1 Perangkat Daerah dengan Judul Inovasi SITERANG an. Drh. Retno Wulan dan Drh. Muhammad Faiz Labib	Perangkat Daerah	Kota Cimahi	1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Cimahi
19.	1 Oktober 2024	Juara 3 Chima Motekar Award Kelompok Peserta 1 Perangkat Daerah dengan Judul Inovasi LASKAR SEHATI an. Mita Mustikasari SPT, MM dan Siti Rahkmah Tenrisul Pakki, ST, MT	Perangkat Daerah	Kota Cimahi	3	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Cimahi

No.	TANGGAL	NAMA PENGHARGAAN	KATEGORI	TINGKAT	PERINGKAT	PEMBERI PENGHARGAAN	LOKASI
20.	1 Oktober 2024	Juara 1 Chima Motekar Award Kelompok Peserta UPTD dengan Judul DIGIT Si EMPUS an. Drh Irfan Fajar Ramadhan dan Ade Ariesta Putri	UPTD	Kota Cimahi	1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Cimahi
21.	1 Oktober 2024	Predikat Khusus Perangkat Daerah Terinovatif Tahun 2024 Pada Kompetisi Chima Motekar Award Tahun 2024	Organisasi Perangkat Daerah	Kota Cimahi	1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi	Cimahi

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada bagian penutup dokumen LAKIP Dispangtan Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dispangtan Kota Cimahi yang mempunyai 5 (lima) indikator sasaran strategis dan 14 (empat belas) sasaran program hampir semua indikator-indikator bisa tercapai dengan baik.

Meskipun berkarakteristik perkotaan, Kota Cimahi memiliki lahan pertanian dan produksi pangan yang mencakup tanaman dan hortikultura. Selain itu, Kota Cimahi juga memiliki area yang dapat memproduksi hasil perikanan dan peternakan. Produksi tanaman pangan terbesar tahun 2024 adalah gabah sebesar 1.206,4 ton sehingga dapat menghasilkan beras sebesar 796,08 ton. Produksi terbesar di Kota Cimahi tahun 2024 berasal dari tanaman hortikultura, yaitu jeruk nipis dengan produksi bersih mencapai 1.530 ton sehingga total produksi buah-buahan di Kota Cimahi tahun 2024 terhitung sebesar 1.948 ton. Dari kelompok sayur-sayuran, Kota Cimahi mampu menghasilkan produksi sebesar 985,7 ton dengan jumlah produksi terbanyak berasal dari 305,5 ton kangkung. Pangan sumber protein yang berasal dari peternakan dan perikanan juga diproduksi oleh Kota Cimahi. Produksi daging terbanyak berasal dari kelompok ruminansia, yaitu daging sapi sebesar 123,3 ton dan dari kelompok unggas, yaitu daging ayam buras sebesar 12,3 ton. Produksi telur memberikan kontribusi terhadap nilai produksi pangan hewani sebesar 39 ton yang berasal dari produksi telur ayam buras dan telur itik. Sementara itu, susu sapi yang dihasilkan di Kota Cimahi tahun 2024 mencapai 1.394 ton.

Untuk sasaran strategis 3, Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah dengan indikator Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan. Hal yang dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan

penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial. Secara umum kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan kerawanan pangan;
2. Fluktuasi harga pangan;
3. Wabah penyakit hewan;
4. Keanekaragaman dan keamanan pangan;
5. Alih fungsi lahan pertanian;

4.2 Upaya Tindak Lanjut

Strategi utama yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, khususnya pada aspek ketersediaan pangan adalah peningkatan jumlah dan keragaman pangan terutama pada kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula melalui langkah-langkah sebagai berikut :

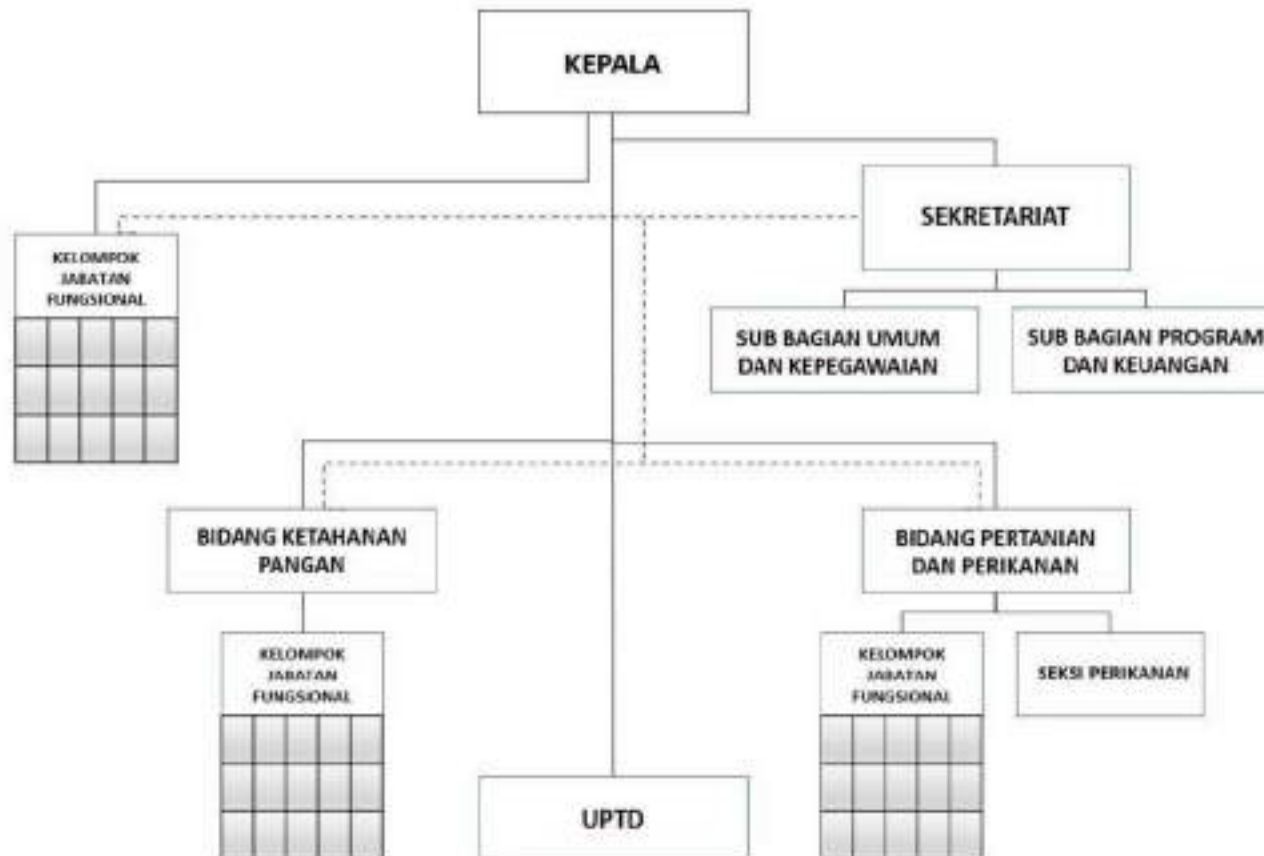
1. Mempertahankan produksi pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan melalui :
 - a) Menjaga alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian;
 - b) Optimalisasi pemanfaatan lahan sub optimal, lahan tidur, lahan kering maupun lahan pekarangan untuk pangan;
 - c) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
 - d) Mengembangkan *urban farming* di lahan sempit dengan berbagai bentuk, seperti kebun komunitas, berkebun di atap atau balkon rumah, budikdamber, dan lainnya.
2. Mendorong pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang bergerak dalam olahan pangan lokal
3. Penguatan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kota;
4. Menjamin ketersediaan pangan melalui upaya stabilitas pasokan pangan, terutama yang berkaitan dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
5. Meningkatkan upaya pengendalian harga dan stok pangan, terutama yang berkaitan dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
6. Mencegah dan mengurangi terjadinya *food loss* dan *food waste* di setiap tahap rantai pasok, yaitu produksi, pasca panen, dan

penyimpanan, pemrosesan, dan pengemasan, distribusi dan pemasaran, serta konsumsi;

7. Meningkatkan manajemen data pokok ketersediaan pangan, yaitu :
 - a) Pencatatan data produksi pangan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan secara rutin;
 - b) Pencatatan data perdagangan pangan untuk mengetahui tingkat kecukupanpenyediaan pangan secara rutin;
8. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam upaya penyediaan panganyang cukup baik dari segi jumlah maupun keragamannya;

LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN 2024**





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TITA MARIAM, S.Pt., M.M.**
Jabatan : **Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.**
Jabatan : **Pj. Wali Kota Cimahi**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

Pihak Kedua,

PJ. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI,**

TITA MARIAM, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700706 199803 2 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (nilai)	77,04
2	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Nilai PPH Ketersediaan (Nilai)	2183
		Skor PPH Ketersediaan (Skor/Nilai)	89,8
		Presentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian (persen)	1,55%
3	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan (persen)	100%

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.646.755.649,00
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.156.887.946,00
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 2.697.888.750,00
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 76.982.600,00
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 825.365.213,00
6. Program Pengolahan dan Pemerasan Hasil Perikanan	Rp 241.563.300,00
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 43.104.000,00
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 929.163.377,00
9. Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 3.984.000,00
10. Program Penyuluhan Pertanian	Rp 2.217.296.085,00
Jumlah Anggaran	Rp 18.838.990.920,00

Cimahi, Oktober 2024

PJ. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI,**

TITA MARIAM, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700706 199803 2 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ir. YOSEPHINA DEWANTI., MM**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM,S.Pt.,MM**

Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

TITA MARIAM,S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,

Ir.YOSEPHINA DEWANTI., MM
NIP. 19670322 199203 2 000

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Nilai
			Nilai IKM Perangkat Daerah	81,5	Nilai
			Indeks Profesionalitas ASN	68,5	Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.646.755.649	APBD

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000



Ir. YOSEPHINA DEWANTI., MM
NIP. 19670322 199203 2 000



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **TUTUSARI,SS**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir.YOSEPHINA DEWANTI., MM**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

Ir.YOSEPHINA DEWANTI., MM
NIP. 19670322 199203 2 000

PIHAK PERTAMA,

TUTUSARI,SS
NIP. 19740331 1998032005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen
	Sub Kegiatan			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	65	orang
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya penunjang administrasi umum perangkat daerah	100	persen
	Sub Kegiatan			
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik kantor yang disediakan	2	Paket
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	2	Laporan
C	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen
	Sub Kegiatan			
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12	Laporan
D	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemeliharaan daerah	100	Persen
	Sub Kegiatan			
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dpelihara/direhabilitasi	2	unit

	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Rp.	62.104.000	APBD
2.	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor	Rp.	9.519.000	APBD
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	29.392.000	APBD
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	19.482.800	APBD
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	12.500.000	APBD
6.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.	1.990.000	APBD
7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	329.087.919	APBD
8.	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Rp.	403.321.960	APBD

PIHAK KEDUA,



Ir.YOSEPHINA DEWANTI., MM
NIP. 19670322 199203 2 000

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,



TUTUSARI,SS
NIP. 197403311998032005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **NIA FATMAWATI H, S.Kom.,M.A.P**

Jabatan : **Analisis Rencana Program dan Kegiatan**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir.YOSEPHINA DEWANTI., MM**

Jabatan : **Sekretaris**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

Ir.YOSEPHINA DEWANTI., MM
NIP. 19670322 199203 2 00

PIHAK PERTAMA,

NIA FATMAWATI H, S.Kom.,M.A.P
NIP. 19770916 201101 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	18	Dokumen
		Terfasilitasinya penyelenggaraan forum perangkat daerah	1	Kali
		Terfasilitasinya rapat koordinasi terkait perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja PD	12	Dokumen
	Sub Kegiatan			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Laporan
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya penunjang administrasi umum perangkat daerah	100	Persen
	Sub Kegiatan			
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Bulan
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen
C	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen
	Sub Kegiatan			

6	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan
---	--	--	----	---------

	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	57.638.850	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	23.117.900	APBD
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	36.244.500	APBD
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	249.284.000	
5.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.	28.700.000	APBD
6.	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	101.123.592	APBD

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,



Ir. YOSEPHINA DEWANTI., MM
NIP. 19670322 199203 2 00

PIHAK PERTAMA,



NIA FATMAWATI H, S.Kom., M.A.P
NIP. 19770916 201101 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **AGUS HADIYANTO,S.A.P**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir.YOSEPHINA DEWANTI., MM**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Ir.YOSEPHINA DEWANTI., MM
NIP. 19670322 199203 2 000

AGUS HADIYANTO,S.A.P
NIP. 19810506 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAH

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya penunjang administrasi umum perangkat daerah	100	Persen
	Sub Kegiatan			
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket
B	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemeliharaan daerah	100	Persen
2	Penyediaan Jasa pemeliharaan pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasionalatau lapangan yang dipelihara daan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	unit

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp. 166.360.273	APBD
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 192.676.240	APBD

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,



Ir. YOSEPHINA DEWANTI, MM
NIP. 19670322 199203 2 000

PIHAK PERTAMA,



AGUS HADIYANTO, S.A.P
NIP. 19810506 201001 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MITA MUSTIKASARI, S. Pl. MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM, S. Pl., MM**

Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

TITA MARIAM, S. Pl., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,

MITA MUSTIKASARI, S. Pl. MM
NIP. 19700517 199903 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Program	Indikator Program	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	11.76	Persen
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	30	Persen
3.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100	Persen
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	290	Ton
		Jumlah Produksi Ikan Hias	2.470.000	Ekor
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner	100	Persen
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil	2	Persen

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 825.365.213	APBD
2.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 241.563.300	APBD
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 43.104.000	APBD
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 929.163.377	APBD
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 3.984.000	APBD
6.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 2.217.296.250	APBD

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


TITA MARIAM, S.Pt., MM
 NIP. 19700706 199803 2 000


MITA MUSTIKASARI, S. Pt. MM
 NIP. 19700517 199903 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SITI RAKHMAH TENRISUI PAKKI, ST**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM, S.Pt., MM**

Jabatan : **Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,

SITI RAKHMAH TENRISUI PAKKI, ST
NIP. 19760728 200501 2 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kawasan	1	Kawasan
	Sub Kegiatan			
1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dok)	1	Dokumen
B	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik skor kelompok (kelompok)	6	Kelompok
2	Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6	unit
3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	33	unit

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Rp. 43.104.000	APBD
2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di kecamatan dan Desa	Rp. 120.248.650	APBD
3.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp. 2.097.047.600	APBD

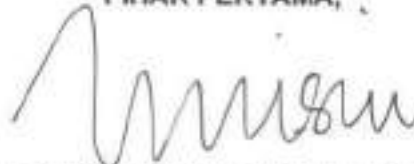
Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,



TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,



SITI RAKHMAH TENRISUI PAKKI, ST
NIP. 19760728 200501 2 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ARI SUSANTO, SP**

Jabatan : Kepala Seksi Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MITA MUSTIKASARI, S. Pt. MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

MITA MUSTIKASARI, S.Pt., MM
NIP. 19700517 199903 2 004

ARI SUSANTO, SP
NIP. 19710708020080101004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	
A	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang diberdayakan (Kelompok)	16	Kelompok
	Sub Kegiatan			
1	Pemberian pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi serta penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4	Kelompok
2	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	umlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen
B	Kegiatan pembinaan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha Pengolahan dan Pemasar Produk Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil (UPI)	10	Unit Pengolah Ikan (UPI) dan Pemasar Ikan
	Sub Kegiatan			
3	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha	25	Unit usaha

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 245.257.103	APBD

- | | | | | |
|----|--|-----|-------------|------|
| 2. | Penyediaan Data dan Informasi
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan
Persyaratan atau Standar pada Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro
dan Kecil | Rp. | 4.999.450 | APBD |
| 3. | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan
Persyaratan atau Standar pada Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro
dan Kecil | Rp. | 241.563.300 | APBD |

PIHAK KEDUA,



MITA MUSTIKASARI, S.Pl., MM
NIP. 19700517 199903 2 004

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,



ARI SUSANTO, SP
NIP. 19710708020080101004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **drh. RR. RETNO WULAN**

Jabatan : **Medik Veteriner Ahli Muda**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM, S.Pt., MM**

Jabatan : **Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,

drh. RR. RETNO WULAN
NIP. 19820502 200902 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Kegiatan Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi menular dalam Daerah kabupaten/Kota (kelurahan)		
		Rabies	1000	Ekor
		Flu Burung	600	Ekor
	Sub Kegiatan			
1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan
B	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan qurban yang diperiksa (ekor)	3000	Ekor
		Jumlah Pengujian pangan asal hewan (sample)	30	sample
	Sub Kegiatan			
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk hewan	2	laporan
C	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi perizinan (Rekomendasi)	5	Rekomendasi
	Sub Kegiatan			
3	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (dok)	2	Dokumen

	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	138.397.899	APBD
2.	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Rp	58.771.300	APBD
3.	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Rp.	3.984.000	APBD

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,



TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,



drh. RR. RETNO WULAN
NIP. 19820502 200902 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DADAN SAEPULOH, ST**

Jabatan : Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM, S.Pt., MM**

Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,

DADAN SAEPULOH, ST
NIP. 19691101 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Program	Indikator Program	Target	Satuan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rata-rata Ketersediaan energi	2183	kkal/kap/hari
		Rata rata Ketersediaan Protein perkapita	66.2	gr/kap/hari
		Rata-rata Konsumsi energi	1993.4	kkal/kap/hari
		Rata rata Konsumsi Protein	57	gr/kap/hari
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin	100	Persen
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase pangan segar yang aman dikonsumsi	90	Persen

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 1.156.887.946	APBD
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 2.697.888.750	APBD
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 76.982.600	APBD

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,



TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,



DADAN SAEPULOH, ST
NIP. 19691101 199703 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **AGUS MAMIDIN PARID,SP**
Jabatan : **Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM,S.Pl., MM**
Jabatan : **Kepala Bidang Ketahanan Pangan**
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

TITA MARIAM,S.Pl., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,

AGUS MAMIDIN PARID, SP
NIP. 197005252007011019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coeficent Varian) Bahan Pangan Pokok	12	Laporan
	Sub Kegiatan			
1	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	24	unit
B	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan/kebutuhan pangan daerah)	70	Persen
	Sub Kegiatan			
2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20	Ton
C	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah penanganan kasus kerawanan pangan (KK)	100	Persen
	Sub Kegiatan			
3	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Rp 203.119.848	APBD
2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 303.742.100	APBD
3. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.653.479.950	APBD

PIHAK KEDUA,



TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 19803 2 000

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,



AGUS MAMIDIN PARID, SP
NIP. 197005252007011019



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DIEN ANDRIANI, SKH**

Jabatan : **Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM, S.Pt., MM**

Jabatan : **Kepala Bidang Ketahanan Pangan**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,

DIEN ANDRIANI, SKH
NIP. 19780505 20112 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	PPh Konsumsi (Skor)	90.14	Skor
	Sub Kegiatan			
1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dok)	2	Dokumen
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	4	Laporan
B	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan ke retail atau pasar (kali)	12	Kali
	Sub Kegiatan			
3	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Laporan
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Rp 177.233.000	APBD
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 358.407.248	APBD
3. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Rp 26.988.000	APBD

4. Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengujian Mutu dan Keamanan
Pangan Segar Asal Tumbuhan
Daerah Kabupaten/Kota

Rp

49.994.600 APBD

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,



TITA MARIAM S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,



DIEN ANDRIANI, SKH
NIP. 19780505 20112 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ENDEN ROSDIYANI,S.IP**

Jabatan : **Analisis Pangan**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DADAN SAEPULOH, ST**

Jabatan : **Kepala Bidang Ketahanan Pangan**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

DADAN SAEPULOH, ST
NIP. 19691101 199703 1 005

PIHAK PERTAMA,

ENDEN ROSDIYANI,S.IP
NIP. 19790612 201001 2 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coeficent Varian) Bahan Pangan Pokok	12	Laporan
	Sub Kegiatan			
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Dok NBM)	4	Dokumen
2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Stok Pangan	12	Dokumen
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (laporan)	2	Laporan
B	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan wilayah penanganan kerawanan pangan (Kecamatan)	3	Kecamatan
	Sub Kegiatan			
4	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan (Dok)	1	Dokumen

	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca	Rp	49.599.700	APBD
2.	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Rp	64.599.700	APBD
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Rp	15.581.500	APBD

4. Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Rp. 28.705.300 APBD

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,



DADAN SAEPULOH, ST
NIP. 19691101 199703 1 005

PIHAK PERTAMA,



ENDEN ROSDIYANI, S.IP
NIP. 19790612 201001 2 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **drh. IRFAN FAZAR RAMADHAN**

Jabatan : Kepala UPT Puskesmas

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM, S.Pt., MM**

Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,

drh. IRFAN FAZAR RAMADHAN
NIP. 19800716 200501 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	6500	Ekor
		Jumlah penerimaan Retribusi kabupaten/Kota	275.650.000	Rupiah
	Sub kegiatan			
1.	Layanan pengobatan hewan	Jumlah pelayanan jasa Medik Veteriner	12	Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 731.994.178	APBD

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,



TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,



drh. IRFAN FAZAR RAMADHAN
NIP. 19800716 200501 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DEVI KURNIAWAN, S.A.P**

Jabatan : Kasubag TU UPT Puskesmas

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **drh. IRFAN FAZAR RAMADHAN**

Jabatan : Kepala UPT Puskesmas

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

drh. IRFAN FAZAR RAMADHAN
NIP. 19800716 200501 1 006

PIHAK PERTAMA,

DEVI KURNIAWAN, S.A.P
NIP. 198107182006041007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah laporan pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan
	Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah (UPTD Puskesmas)	Sarpras dalam kondisi baik	90	Persen
		Capaian penyerapan anggaran	90	Persen
		ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan	100	Persen
		Laporan tepat waktu	100	Persen

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp. 731.994.178	APBD

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,



drh. IRFAN FAZAR RAMADHAN
NIP. 19800716 200501 1 006

PIHAK PERTAMA,



DEVI KURNIAWAN, S.A.P
NIP. 198107182006041007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ATI LISTIANAWATI, S.Pt., M.A.P.**

Jabatan : Kepala UPT. BBIAT

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **TITA MARIAM, S.Pt., MM**

Jabatan : Kepala Dinas Pangan Pangan Pertanian

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Januari 2024

PIHAK KEDUA,

TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,

ATI LISTIANAWATI, S.Pt., M.A.P.
NIP. 197105181998032004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan (ekor)	97.725	Ekor
		Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan (ekor)	7.500	Ekor
		Jumlah penerimaan retribusi (rupiah)	50.000.000	Rupiah
	Sub Kegiatan			
1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	1	unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Rp. 527.886.710	APBD

Cimahi, 2024

PIHAK KEDUA,



TITA MARIAM, S.Pt., MM
NIP. 19700706 199803 2 000

PIHAK PERTAMA,



ATI LISTIANAWATI, S.Pt., M.A.P
NIP. 197105181998032004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MULA FEBIANTO, S.T., M.Si.**

Jabatan : Kasubag TU UPT. BBIAT

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ATI LISTIANAWATI, S.Pt., M.A.P.**

Jabatan : Kepala UPT. BBIAT

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

ATI LISTIANAWATI, S.Pt., M.A.P.
NIP. 197105181998032004

PIHAK PERTAMA,

MULA FEBIANTO, S.T., M.Si.
NIP. 197902042010011004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	1	Unit
	Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah	Persentase Sarpras dalam kondisi baik	90	Persen
		Persentase Capaian penyerapan anggaran	90	Persen
		Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan	80	Persen
		Persentase Laporan tepat waktu	100	Persen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Rp. 527.886.710	APBD

Cimahi, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,



ATI LISTIANAWATI, S.Pt., M.A.P.
NIP. 197105181998032004

PIHAK PERTAMA,



MULA FEBIANTO, S.T., M.Si.
NIP. 197902042010011004

DATA PENGELOLAAN KINERJA LKIP DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Materi Pokok Bahasan / Rincian Substansi	F1		F2		F3		F4		F5		F6		F7		F8		F9		F10		F11	
			Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target 2026	Realisasi 2026	Capaian 2026	Target 2027	Realisasi 2027	Capaian 2027	Target 2028	Realisasi 2028	Capaian 2028	Target 2029	Realisasi 2029	Capaian 2029	Target 2030	Realisasi 2030	Capaian 2030	Target 2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A. Sasaran 1: Meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi																								
1	Indikator Kinerja Utama 1.1	Indikator Kinerja Utama 1.1: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indikator Kinerja Utama 1.2	Indikator Kinerja Utama 1.2: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indikator Kinerja Utama 1.3	Indikator Kinerja Utama 1.3: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indikator Kinerja Utama 1.4	Indikator Kinerja Utama 1.4: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Indikator Kinerja Utama 1.5	Indikator Kinerja Utama 1.5: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Indikator Kinerja Utama 1.6	Indikator Kinerja Utama 1.6: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indikator Kinerja Utama 1.7	Indikator Kinerja Utama 1.7: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Indikator Kinerja Utama 1.8	Indikator Kinerja Utama 1.8: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Indikator Kinerja Utama 1.9	Indikator Kinerja Utama 1.9: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Indikator Kinerja Utama 1.10	Indikator Kinerja Utama 1.10: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Indikator Kinerja Utama 1.11	Indikator Kinerja Utama 1.11: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Indikator Kinerja Utama 1.12	Indikator Kinerja Utama 1.12: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Indikator Kinerja Utama 1.13	Indikator Kinerja Utama 1.13: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Indikator Kinerja Utama 1.14	Indikator Kinerja Utama 1.14: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Indikator Kinerja Utama 1.15	Indikator Kinerja Utama 1.15: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Indikator Kinerja Utama 1.16	Indikator Kinerja Utama 1.16: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Indikator Kinerja Utama 1.17	Indikator Kinerja Utama 1.17: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Indikator Kinerja Utama 1.18	Indikator Kinerja Utama 1.18: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Indikator Kinerja Utama 1.19	Indikator Kinerja Utama 1.19: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Indikator Kinerja Utama 1.20	Indikator Kinerja Utama 1.20: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Indikator Kinerja Utama 1.21	Indikator Kinerja Utama 1.21: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Indikator Kinerja Utama 1.22	Indikator Kinerja Utama 1.22: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Indikator Kinerja Utama 1.23	Indikator Kinerja Utama 1.23: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Indikator Kinerja Utama 1.24	Indikator Kinerja Utama 1.24: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Indikator Kinerja Utama 1.25	Indikator Kinerja Utama 1.25: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Indikator Kinerja Utama 1.26	Indikator Kinerja Utama 1.26: Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi biaya produksi (KPI: Efisiensi Biaya Produksi) (KPI: Efisiensi Biaya Produksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										

